

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial. Menurut Arsyad (2010), Pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sedangkan menurut Meier (1995), pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil per kapita meningkat dalam waktu lama. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Salah satu target yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi (Shinta dan Maruto, 2010). Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pada pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi meningkat. Menurut para ekonom dalam Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau

lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal tersebut dapat diartikan pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan dari pendapatan nasional atau dalam hal ini adalah GDP atau PDB. Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun (Arsyad, 2010). Menurut Todaro (2006), Selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengelola potensi dan sumber daya yang ada bagi masing-masing daerah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan masing-masing daerah tidak dapat lepas dari permasalahan pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau daerah yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat mengatasi permasalahan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan pendapatan adalah

menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun waktu tertentu. Menurut Shinta dan Maruto (2010), disparitas pertumbuhan regional dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin meningkat, hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pembangunan yang membawa dampak perbedaan tingkat kesenjangan antar daerah.

Meski kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai penyempurnaan, namun masih banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan secara sosial ekonomi. Ketimpangan tersebut pada gilirannya menciptakan kelompok-kelompok penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya-sumber daya pembangunan.

Indonesia adalah negara dengan kebhinekaan yang tinggi di mana perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya sumber daya berupa minyak dan juga pertumbuhan pusat perdagangan dan industri terkonsentrasi di beberapa daerah menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan sehingga ketimpangan *output* antar daerah menjadi tinggi (Tadjoeddin, dkk, 2001:6).

Sentralisasi pembangunan, pertumbuhan yang tidak merata dan distribusi pendapatan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi mayoritas pembangunan daerah di Indonesia saat ini. Pelaksanaan otonomi daerah mencoba meminimalisir dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan sekaligus mencoba mengubah paradigma pembangunan ke arah desentralistik. Walaupun memberikan harapan terhadap pendapatan yang berkeadilan namun kenyataannya tidaklah menjamin pertumbuhan ekonomi tumbuh cepat dan merata di semua daerah.

Ada beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya cepat dan ada juga beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya lambat. Hal ini disebabkan tiap daerah memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur yang berbeda-beda, begitu juga dengan investasi. Para investor akan lebih menyukai berinvestasi di daerah yang relatif maju dan memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik.

Menurut Arsyad (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*Trickle Down Effects*" atau efek cucuran kebawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat. Semakin besar perbedaan pembagian pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini (Arsyad 2010). Disparitas antar daerah tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas bahkan sampai saat sekarang.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan

distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi. Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis “U-terbalik” Kuznets. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006).

Pulau Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia. Pulau ini dikelilingi oleh perairan Laut Jawa, Selat Sunda, Samudera Hindia dan Selat Bali. Daratan Pulau Jawa terbujur dari barat ke timur dan diperkirakan memiliki luas wilayah daratan kurang lebih sekitar 126.700 kilometer persegi. Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya per kilometer persegi di Indonesia.

Secara administratif Pulau Jawa dibagi atas 6 Provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini juga meliputi beberapa pulau di sekitar Pulau Jawa diantaranya Pulau Madura, Kepulauan Seribu dan Kepulauan Karimun Jawa serta beberapa pulau kecil lainnya yang tersebar di seluruh garis pantai Pulau Jawa.

Kegiatan ekonomi nasional sebagian besar masih berpusat di Pulau Jawa. Hal ini tampak dari besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh enam provinsi di Pulau Jawa, dimana pada tahun 2013, enam provinsi di Pulau Jawa menyumbang 57,96 persen PDB nasional. DKI Jakarta memberikan kontribusi terbesar, yaitu 16,57 persen, diikuti Jawa Timur 14,99 persen, Jawa Barat 14,12 persen, Jawa Tengah 8,23 persen, Banten 3,23 persen, dan DI Yogyakarta 0,84 persen (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Peranan PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Terhadap PDB Nasional (persen), 2009-2013

Provinsi	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
1. DKI Jakarta	16,37	16,28	16,30	16,40	16,57
2. Jawa Barat	14,91	14,58	14,29	14,07	14,12
3. Banten	2,87	3,24	3,19	3,16	3,23
4. Jawa Tengah	8,60	8,40	8,28	8,27	8,23
5. DI Yogyakarta	0,89	0,86	0,86	0,85	0,84
6. Jawa Timur	14,84	14,71	14,67	14,88	14,99
Kontribusi Pulau Jawa	58,48	58,07	57,59	57,63	57,98
Nasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS (data diolah)

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi enam provinsi di Pulau Jawa terhadap pembentuk nilai tambah pada PDB Nasional cenderung menurun, dari 58,48 persen di tahun 2009 menjadi 57,98 persen di tahun 2013. Kondisi ini cukup mengembirakan, karena berarti kegiatan ekonomi di provinsi lain luar Pulau Jawa bergerak lebih cepat, sehingga kontribusinya dalam pembentukan PDB Nasional juga ikut meningkat.

Kinerja ekonomi nasional selama tahun 2013 masih cukup mengembirakan, meski pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 6,33 persen pada tahun 2012 menjadi 5,78 persen pada tahun 2013. Perlambatan tersebut diduga kuat terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan Kenaikan Tarif Dasar Listrik yang

terjadi pada pertengahan tahun 2013. Kinerja yang sama juga terlihat di enam provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional (persen), 2009-2013

Provinsi	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
1. DKI Jakarta	5,02	6,50	6,73	6,53	6,11
2. Jawa Barat	4,19	6,20	6,51	6,28	6,06
3. Banten	4,71	6,11	6,38	6,15	5,86
4. Jawa Tengah	5,14	5,84	6,03	6,34	5,81
5. DI Yogyakarta	4,43	4,88	5,17	5,32	5,40
6. Jawa Timur	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55
Nasional	4,63	6,20	6,49	6,23	5,78

Sumber : BPS (data diolah)

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Pada tahun 2013, Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu mencapai 6,55 persen. Sementara itu, DKI Jakarta tumbuh 6,11 persen, Jawa Barat 6,06 persen, Banten 5,86 persen, Jawa Tengah 5,81 persen, dan DI Yogyakarta 5,40 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti pula oleh naiknya PDRB perkapita di tiap-tiap provinsi. DKI Jakarta masih menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan PDRB perkapita tertinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp.125,97 juta, sekaligus menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa dengan PDRB perkapita yang lebih besar dibanding PDB Nasional.

Dibanding dengan tahun 2012, DKI Jakarta mengalami kenaikan PDRB perkapita terbesar, yaitu sebesar Rp.13,83 juta. Sedangkan secara relatif, PDRB perkapita Jawa Timur mengalami kenaikan paling besar, yaitu 12,54 persen, diikuti Banten 12,37 persen, DKI Jakarta 12,33 persen, Jawa Barat 11,01 persen, Jawa Tengah 9,39 persen, dan Di Yogyakarta 9,18 persen. Meskipun tidak bisa secara eksplisit menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan di suatu wilayah, namun PDRB perkapita masih cukup relevan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah semakin meningkat atau tidak.

Tabel 1.3. PDRB Per Kapita Provinsi-Provinsi di Jawa dan Nasional
(juta rupiah),2009-2013

Provinsi	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
1. DKI Jakarta	39,93	40,75	40,97	45,53	47,33
2. Jawa Barat	6,81	7,10	7,41	7,58	8,05
3. Banten	7,72	8,36	8,60	7,40	9,83
4. Jawa Tengah	4,83	5,13	5,35	5,55	5,75
5. DI Yogyakarta	5,85	6,06	6,32	6,61	6,73
6. Jawa Timur	7,72	8,89	9,17	10,07	10,69
Nasional	23,90	27,08	30,42	33,34	36,50

Sumber : BPS (data diolah)

*) Angka Diperbaiki

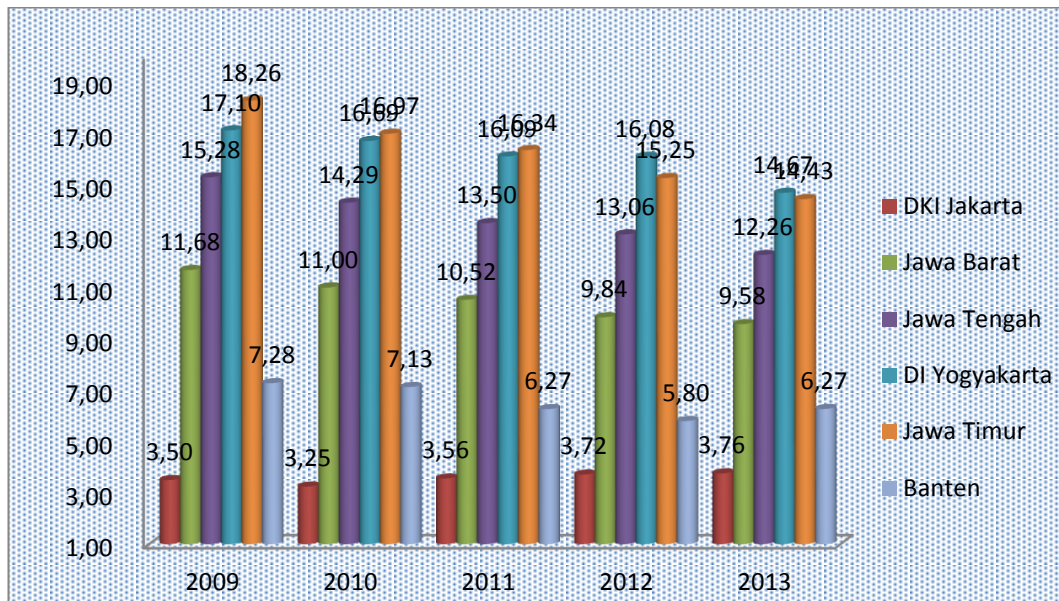
**) Angka Sementara

Data dekade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak negara berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.

Studi (Abdullah, 2007) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an. Abdullah (2007) membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar dan perubahan kebijakan publik.

Para pencari kerja biasanya lebih memilih daerah perkotaan karena daerah perkotaan lebih memiliki banyak peluang menerima tenaga kerja baru. Hal ini menjadi masalah kepadatan penduduk bagi daerah yang menerima pencari kerja dari daerah-daerah miskin ke kota-kota besar. Oleh karena di kota-kota besar tersebut relatif banyak golongan ekonomi lemah dari penduduk asli ataupun dari daerah-daerah lain dapat mengakibatkan saling berebut tempat dan peluang antar kelompok daerah asal (Risfan Munir, 2003).

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin menurut Provinsi di Pulau Jawa pada periode 2009-2013. Dari gambar tersebut tampak bahwa jumlah penduduk miskin terbesar masih berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu pada September 2011 tercatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi yaitu mencapai 18,26 persen orang miskin namun dari tahun 2011-2013 terjadi penurunan. Sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu di tahun 2011 sebesar 3,50 persen tetapi dari tahun 2011-2013 terjadi peningkatan penduduk miskin.



Gambar 1.1 Persen Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa, 2009-2013

Sumber : Statistik Indonesia

Meskipun Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa namun jika dilihat periode lima tahun terakhir sampai pada September 2013 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 1,31 persen orang miskin. Perubahan berbeda terlihat pada Provinsi DKI Jakarta, meskipun dalam periode lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta cukup tinggi dalam tabel 1.2 namun persen penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat pada periode tahun 2009-2013.. Pada tahun 2011 persen penduduk miskin DKI Jakarta naik menjadi 3,56 persen orang dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2013 naik sebesar 0,4 persen orang miskin.

Fenomena yang terjadi pada tabel sebelumnya bahwa tabel 1.2 (Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa) di DKI Jakarta pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, dan diikuti oleh PDRB perkapita yang sangat tinggi pada tabel 1.3, seharusnya diimbangi dengan persen penduduk miskin yang semakin rendah ini sesuai dengan pernyataan Tisna (2008). Namun

kenyataan ini berbeda karena pada gambar 1.1 dimana persen penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2009-2013 semakin meningkat. Jika mengikuti Tisna (2008) maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perubahan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Sementara itu tabel 1.2 dan gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang baik tidak sepenuhnya mengurangi kemiskinan, bahkan yang terlihat kecenderungan perkembangan penduduk miskin yang “searah” dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang di sertai jumlah penduduk miskin yang tinggi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antar sub wilayah, sektor atau kelompok penduduk di Pulau Jawa. Ada sub sektor, wilayah atau penduduk yang menyumbang pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain ada sub sektor, wilayah atau penduduk yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut sehingga jumlah penduduk miskin tetap saja meningkat. Dengan kata lain ada pembangunan yang tidak merata sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi didasarkan oleh sebagian saja dan ada pola pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar Provinsi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul **“Analisis Kesenjangan dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa (periode tahun 2009-2013)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat kesenjangan antar propinsi dan antar wilayah di Pulau Jawa periode tahun 2009-2013 ?
2. Bagaimana klasifikasi dan pola pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Pulau Jawa periode tahun 2009-2013 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui besar tingkat kesenjangan antar propinsi dan antar wilayah di Pulau Jawa periode tahun 2009-2013.
2. Untuk mengetahui klasifikasi dan pola pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Pulau Jawa periode tahun 2009-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada :

1. Penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.
2. Pemerintah daerah sebagai pertimbangan alternatif untuk menyusun kebijakan ekonomi dan sebagai sumber informasi tentang kinerja masing-masing sektor serta mengambil kebijakan atas terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan setiap Provinsi di Pulau Jawa.
3. Akademisi sebagai tambahan referensi mengenai masalah ketimpangan pendapatan.